



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 164 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 30);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 164

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 164 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun ketiga, pada periode Renstra 2021 – 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dispusip dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan PD tahun 2025.

Demikian Perubahan Renja Dispusip Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana program dan kegiatan Dispusip Tahun 2025 disusun. Saran dan kritik membangun sangat diperlukan bagi penyusunan dokumen Perubahan Renja berikutnya ke arah yang lebih baik. Salam Bedas.

**KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN BANDUNG**

H. TEGUH PURWAYADI, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19810123 199912 1 001

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA DISPUSIP	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja dan Capaian Renstra DISPUSIP	8
2.2 Analisis Kinerja DISPUSIP.....	26
2.2.1 Urusan Kearsipan.....	30
2.2.2 Urusan Perpustakaan.....	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DIPUSIP.....	33
2.3.1 Isu-Isu Strategis Daerah.....	33
2.3.2 Isu-Isu Strategis DISPUSIP.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasaional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
3.3 Program dan Kegiatan.....	49
3.4 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kab. Bandung.....	51
3.4.1 Manfaat Penyelenggaraan PUG.....	52
3.4.2 Mekanisme PUG.....	52
3.4.3 Kelembagaan PUG.....	53
3.4.4 Hambatan Pelaksanaan PUG.....	53
BAB IV PERUBAHAN RENJA DAN PENDANAAN DISPUSIP	55
BAB V PENUTUP	64

Daftar Isi

Hal

2.1	Evaluasi Sasaran Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2021.....	11
2.2	Rekapitulasi Perubahan Renja Tahun 2025.....	20
2.4	Review Terhadap Rancangan RKPD.....	35
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	44
3.3	Program dan Kegiatan.....	49
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISPUSIP Tahun 2025 (Kepmendagri 050).....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, yang meliputi 3 tahapan, antara lain : Tahap Penyusunan, Tahap Rancangan dan tahapan penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025, setelah tahapan-tahapan dilalui maka disempurnakanlah menjadi Dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip yang Definitif.

**KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

H. TEGUH PURWAYADI, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19810123 199912 1 001

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Hak Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang PUG Sebagai Lintas Bidang dalam Pembangunan; Penetapan Target dan Indikator Kinerja PUG;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Instruksi Kepada Para Menteri K/L, Para Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Untuk Melaksanakan PUG
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2

- Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025;
 30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung;
 31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi DISPUSIP;

32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DISPUSIP;
33. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.
35. SEB 4 Menteri: Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia & KPPPA, Tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan PU Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispupisip) Kabupaten Bandung T.A 2025 adalah untuk merumuskan rencana kerja DISPUSIP dalam periode 1 tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip.

1.3.2 Tujuan

- Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.
- Merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung beserta pagu indikatif dan target indikator kinerja Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika (tata urutan) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Bandung.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DISPUSIP TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISPUSIP

Memuat kajian (review) terhadap hasil hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menyajikan matrik rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PERUBAHAN RENJA DISPUSIP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dalam rencana strategis periode jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2026, dan pada tahun keempat (2025) atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung pada Urusan Perpustakaan dan Arsip. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 (n-2) dan tahun 2026 (tahun berjalan/n-1) yaitu sebagaimana berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan RumahTangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pengembangan Bahan Pustaka
- e. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- f. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
- b. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- c. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Kegiatan : Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
- b. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

4. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- b. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Kegiatan : Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

6. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Kegiatan : Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

Pengukuran kinerja DISPUSIP didasarkan pada sasaran – sasaran dengan capaian sasaran pada Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.1

Evaluasi Sasaran Renja DISPUSIP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Bandung	- Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1)	0.58
		- Pemerataan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2)	0.37
		- Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)	0.31
		- Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM 4)	0.01
		- Perpustakaan ber - SNP (UPLM 5)	1.00
		- Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6)	0.98
		- Jumlah Pemustaka (UPLM 7)	1.00
2	Meningkatnya Tata Kelola Arsip yang Tertib dan Termanfaatkan	- Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	20%
3	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	- Nilai SAKIP	88.10

Dari Tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa ke 3 sasaran yang diemban oleh DISPUSIP, yaitu : Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Bandung; Meningkatnya Tata Kelola Arsip yang Tertib dan Termanfaatkan; serta Meningkatnya.

Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki tingkat capaian 100% pada tahun kedua Renstra 2021-2026. Sedangkan realisasi kinerja maupun anggaran pada program, kegiatan, dan sub kegiatan DISPUSIP tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Target Anggaran T.A. 2025
Dinas Perpustakaan dan Arsip

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	PENANGGUNG JAWAB (PD)
URAIAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TAHUN 2025							
					TARGET CAPAIAN KINERJA				TAHUN 2025			
2	23	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 73.70 - 89.31	- 74.0 - 98.25	11.754.281.46 9,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 persen	100%	138.719.000,0 0	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	95.316.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	11.712.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14.712.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 Laporan	8.102.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	PENANGGUNG JAWAB (PD)
URAIAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TAHUN 2025							
					TARGET CAPAIAN KINERJA				TAHUN 2025			
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Laporan	8.877.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	100%	9.389.485.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	45 Bulan	9.377.565.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 Laporan	4.059.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 dokumen	2 Laporan	7.861.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku	100%	100%	7.008.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7.008.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku	100%	100%	133.470.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Pegawai	2 Paket	31.700.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	2 Dokumen	6.270.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 pegawai	12 Pegawai	95.500.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	PENANGGUNG JAWAB (PD)
URAIAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TAHUN 2025							
					TARGET CAPAIAN KINERJA				TAHUN 2025			
2	23	2.23 .22 4.0. 00.2 1.00	1	2 , 1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP	100%	100%	326.907.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	1 Paket	7.150.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis	1 Paket	150.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 jenis	20 Paket	4.077.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 jenis	1 Paket	5.346.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	2 Paket	47.168.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	3 Dokumen	18.059.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Orang Kegiatan	3 Laporan	17.127.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	40 Laporan	70.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Daftar Arsip	3 Dokumen	7.980.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .22 4.0. 00.2 1.00	1	2 , 1	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP	100%	100%	29.300.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 jenis	5 Unit	29.300.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	PENANGGUNG JAWAB (PD)
URAIAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TAHUN 2025							
					TARGET CAPAIAN KINERJA				TAHUN 2025			
							Lainnya yang Disediakan					
2	23	2.23 .22 4.0. 00.2 1.00	1	2 , 1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	100%	1.425.428.469,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 surat	2 Laporan	4.572.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	3 Laporan	143.013.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	4 Laporan	1.277.843.469,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .22 4.0. 00.2 1.00	1	2 , 1	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100%	100%	303.964.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	20.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	147.389.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Jenis	3 Unit	20.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 jenis	10 Unit	16.575.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	1	2 , 1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 gedung	2 Unit	100.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
						Jumlah 1				11.754.281.469,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .22 4.0. 00.2	2	0	0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah	45,20	46.00	772.640.500,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	PENANGGUNG JAWAB (PD)
URAIAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TAHUN 2025							
					TARGET CAPAIAN KINERJA				TAHUN 2025			
		1.00										
							Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
							Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		53.80		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .2.2 4.0 00.2 1.00	2	2	0	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan	100%	100%	531.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	10 perpustakaan	275.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan Sekolah	50 perpustakaan sekolah	41.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 Orang	3 orang	45.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	1.100 Judul	1000 Eksemplar	90.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.000 Buku	2000 buku	40.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	PENANGGUNG JAWAB (PD)
URAIAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	AN	SUB. KEGIATAN				TAHUN 2025			
									TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025		
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	1 0	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	2	2	0	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung	100%	100%	241.640.500,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Kegiatan	5 Lokus	40.141.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Kegiatan	18 orang	136.499.500,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Kegiatan	1 Perpustakaan	65.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	3	3	0	Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks			15.000.000,00		
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	3	1	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		53.90	15.000.000,00		
2	23	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	3	0	0	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO	20%	20%	97.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Disarpus
2	23	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	3	2	0	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase naskah kuno yang dikelola dengan baik	100%	100%	97.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	3	2	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Kegiatan	7 orang	56.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	23	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	3	2	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan	1 Kegiatan	1 Eksemplar	41.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	PENANGGUNG JAWAB (PD)
URAIAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TAHUN 2025							
					TARGET CAPAIAN KINERJA				TAHUN 2025			
							Didayagunakan					
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah		87.88	310.363.300,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PD YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU	20%	100%	234.712.300,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	2	2	0	Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang sudah diaudit kearsipan internal	20%	20%	100.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Dokumen	4 Berkas	50.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Laporan	50.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	2	2	0	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Terpelihara	100%	100%	84.712.300,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Jenis	100 Arsip	84.712.300,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	2	2	0	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan	100%	20%	50.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	2	2	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Laporan	50.000.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	3	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE ARSIP YANG TERLINDUNGI	100%	100%	38.413.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	3	2	0	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan	100%	100%	38.413.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	3	2	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan	2 Dokumen	100 Arsip	38.413.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	PENANGGUNG JAWAB (PD)
URAIAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TAHUN 2025							
					TARGET CAPAIAN KINERJA				TAHUN 2025			
						Arsip						
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	4	0	0	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PERSENTASE INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAATKAN	100%	100%	37.238.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23 .2.2 4.0. 00.2 1.00	4	2	0	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.238.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
2	24	2.23. 2.24. 0.00. 21.0 0	4	2	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Dokumen	6500 Arsip	37.238.000,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Disarpus
Jumlah 2										1.180.003.800,00		
Jumlah Total										12.934.285.269,00		

Anggaran Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung dengan APBD (murni) sebesar Rp. 12.934.285.269,- yang terdiri dari 6 program, 16 kegiatan, 48 sub kegiatan. Diantara 48 sub kegiatan tersebut, ada 4 sub kegiatan yang realisasinya di bawah 90%. Sub kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan realisasi sebesar 86.3%. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan realisasi sebesar 75.94%. Pembayaran berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh PLN, PDAM, dan Telkom. Kurang memprediksi dengan cermat kebutuhan di tahun yang bersangkutan.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan realisasi sebesar 89.39%. Hal ini dikarenakan SSH dan SBU untuk Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat tinggi. Sementara biaya real tidak sampai setengahnya.
- d. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi sebesar 89.17%. Hal ini dikarenakan sisa uang saku kegiatan yang tidak terserap, karena peserta tidak seluruhnya hadir.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DISPUSIP s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) dapat dilihat rinci pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 74.10 - 99.00								
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	8	4	2	50%	4	10	100%	
X	XX	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	6	2	1	50%	2	8	80%	
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	6	2	1	50%	2	8	80%	
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	6	1	1	100%	1	8	80%	
X	XX	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	8	4	2	50%	4	14	70%	

X	XX	01	2,06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	3	6	3	50%	6	17	340%
X	XX	01	2,06	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	6	19	9	47%	19	50	500%
X	XX	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	9	12	6	50%	12	40	267%
X	XX	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	9	330	165	50%	330	1000	6667%
X	XX	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	140	40	20	50%	40	200	100%
X	XX	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	6	3	1	33%	3	10	67%
X	XX	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISARPUS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
X	XX	01	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	16	0	0	0%	0		
X	XX	01	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	0	0	0%	0		
X	XX	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	7	1	1	100%	1	9	36%
X	XX	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
X	XX	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	6	2200	1100	50%	2200	3306	33060%
X	XX	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	9	12	6	50%	12	27	180%
X	XX	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	12	12	6	50%	12	12	60%
X	XX	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
X	XX	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	15	5	3	60%	5	23	92%

X	XX	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	38	10	5	50%	10	53	106%
X	XX	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	2	1	1	100%	1	4	27%
X	XX	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	14	2	1	50%	2	17	34%
X	XX	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	8	3	1	33%	3	12	120%
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	- Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan	46.10							
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	80	30	40	20	50%	40	55	69%
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	45	150	65	15	23%	65	25	56%
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18	145	170	25	15%	170	10	56%
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	4700	3090	2100	1000	48%	2100	4000	85%
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000	6000	2000	1000	50%	2000	9000	900%
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	3	2	1	50%	2	6	120%

2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	22	9	3	2	67%	3	10	45%
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18	36	5	4	80%	5	45	250%
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	15	7	4	2	50%	4	13	87%
2	23	03	2.01		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase naskah kuno yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5	10	1	1	100%	1	12	240%
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5	3	1	1	100%	1	5	100%
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PD YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang sudah diaudit kearsipan internal	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
2	24	02	2.01	03	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	19	12000	2	2	100%	2	12004	63179%
2	24	02	2.01	02	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	8	3	2	1	50%	2	6	75%
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500	300	2	2	100%	2	304	61%

2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10	6	2	2	100%	2	10	100%
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10	300	2	2	100%	2	304	3040%
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PERSENTASE INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAATKAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	6500	19500	1	1	100%	1	19502	300%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPUSIP) Kabupaten Bandung yang berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung memiliki wewenang untuk menyelenggarakan 2 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

DISPUSIP Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 97).

a. Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPUSIP) mempunyai tugas pokok urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan Perpustakaan memiliki 2 Program yaitu : Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Sedangkan Urusan Kearsipan memiliki 3 Program yaitu : Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dan Program Perizinan Penggunaan Arsip.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, DISPUSIP menyelenggarakan Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 97), Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kabupaten Bandung susunannya terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat, yang membawahi :
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Bidang Pengelolaan Perpustakaan;
- Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas pokok nya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dengan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian Penyusunan Program dan Keuangan serta Pengelolaan Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kesekretariatan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Dinas;
- c. Penyelenggaraan tugas – tugas Kesekretariatan;
- d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi intergrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian Kinerja Sekretariat.

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan Tugas Pokok Memimpin, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Tugas – tugas di Bidang Penyelenggaraan Kearsipan.

Dalam menjalankan Tugas Pokoknya Bidang Penyelenggaraan Kearsipan memiliki Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, meliputi Pembinaan Kearsipan, Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip;
- b. Penyelenggaraan Rencana Kerja Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, meliputi Pembinaan Kearsipan, Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip;
- c. Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Bidang Penyelenggaraan Kearsipan.

Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Bidang Pengelolaan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan Tugas Pokok Memimpin, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Tugas – tugas di Bidang Pengelolaan Perpustakaan.

Dalam menjalankan Tugas Pokoknya Bidang Pengelolaan Perpustakaan memiliki Fungsi :

- a. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengelolaan Perpustakaan, meliputi Seksi Pembinaan Perpustakaan (Pustakawan), Seksi Pengembangan Perpustakaan (Pustakawan), Seksi Informasi dan Layanan Perpustakaan Elektronik (Pustakawan);
- b. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengelolaan Perpustakaan.

Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno

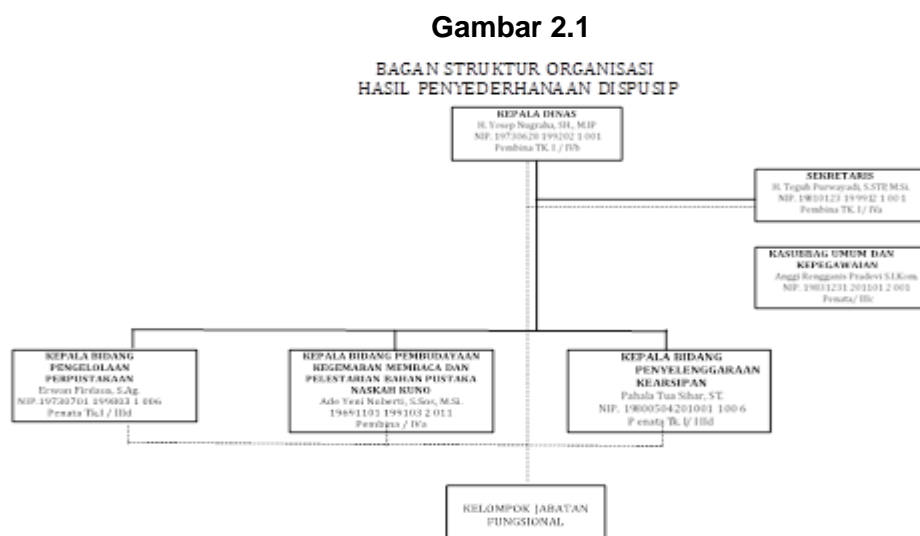
Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas – tugas di bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno.

Dalam melaksanakan tugas pokok nya Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno, meliputi Seksi Pembudidayaan Kegemaran Membaca (Pustakawan), Seksi Pelestarian Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Etnis Budaya Nusantara (Pustakawan), Seksi Kerjasama dan Literasi Inklusi Sosial (Pustakawan);
- b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno, meliputi Seksi Pembudidayaan Kegemaran Membaca (Pustakawan), Seksi Pelestarian Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Etnis Budaya Nusantara (Pustakawan), Seksi Kerjasama dan Literasi Inklusi Sosial (Pustakawan);
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil penyederhanaan :



Sumber : SOTK Dispusip Kab. Bandung

Berdasarkan Misi 2 pada RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 yang telah ditetapkan yaitu : Menyediakan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata, dan sasaran yang menjadi target yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat.

Sejalan dengan Misi 2 beserta tujuan dan sasaran nya, DISPUSIP Kabupaten Bandung memiliki keterkaitan pada Urusan Perpustakaan yang dapat menunjang tercapainya Misi RPJMD tersebut. Tujuan DISPUSIP di Urusan Perpustakaan pada RPJMD adalah meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat dengan indikator nya adalah Indeks Baca masyarakat Kabupaten Bandung dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung. Dimana sasaran tersebut akan ditunjang oleh 2 Program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Sedangkan untuk Urusan Kearsipan sejalan dengan Misi 4 pada RPJMD, yaitu : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Professional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik, dan sasaran yang menjadi target yaitu meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Keterkaitan RPJMD dengan urusan kearsipan dalam mencapai sasaran RPJMD yaitu urusan kearsipan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan arsip internal dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaatkan. Sasaran tersebut didukung oleh 4 Program, yaitu : Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program Pengelolaan Arsip, dan Program Perizinan Penggunaan Arsip.

2.2.1 Urusan Perpustakaan

a. Urusan Perpustakaan memiliki 2 bidang yaitu bidang PP (**Pengelolaan Perpustakaan**), dan bidang **PKMPBPNK (Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno)**. Beberapa fasilitas gedung perpustakaan yang responsif gender, antara lain :

- Ruang Anak
- Ruang Baca Dewasa dan Remaja
- Ruang Koleksi
- Ruang Referensi, Surat Kabar/Majalah

- Ruang Akses Internet + *Gazebo Hot Spot*
 - Ruang Layanan Audio Visual
 - Ruang Layanan Workshop
 - Arena Bermain Anak
 - Mobil Pintar dan Motor Pintar
 - Mobil Perpustakaan Keliling
 - *Website* Perpustakaan www.DISPUSIP.bandungkab.go.id, mulai tayang tahun 2018, sebagai media penyampaian informasi kegiatan Bidang Perpustakaan.
 - Ruang Pojok Sunda
 - Ruang Pojok Braille
 - Ruang BI Corner
 - Ruang Mezanin/Pojok Instagramable
 - Ruang Café Book
 - Ruang Laktasi
 - Toilet yang Representatif (Toilet wanita lebih banyak)
- b. Adapun bentuk layanan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Kabupaten Bandung, diantaranya adalah :
- *Open Access System* atau Sistem Layanan Terbuka, yaitu layanan bagi semua pengguna, baik yang sudah menjadi anggota ataupun yang belum menjadi anggota diberi kebebasan mencari, memilih, dan mengambil sendiri bahan perpustakaan yang diinginkan secara langsung ke rak sesuai dengan kebutuhannya;
 - Layanan Terbitan Berkala, yaitu layanan yang meliputi surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, dan bulletin;
 - Layanan Sirkulasi, yaitu layanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi terhadap koleksi bahan pustaka baik berupa peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota perpustakaan ataupun sebaliknya;
 - Layanan Referensi atau Rujukan, yaitu layanan informasi bahan pustaka kepada masyarakat meliputi kamus – kamus, ensiklopedia, dan tidak dipinjamkan;
 - Layanan *Story Telling*, yaitu layanan bercerita kepada anak – anak pra sekolah dan taman kanak – kanak;
 - Layanan MUPK (Mobil Unit Perpustakaan Keliling), yaitu layanan perpustakaan dengan menggunakan mobil pintar, mobil pusteling,

motor pintar ke beberapa kecamatan, desa/kelurahan yang melayani siswa/siswi sekolah (SD, SMP, SMU, dan Pondok Pesantren);

- Layanan Mobil Perpustakaan Elektronik Keliling;
- Layanan Perpustakaan Berbasis Informasi dan Teknologi, yaitu layanan berbasis internet, OPAC (*Online Public Access Catalogue*);
- Layanan Pelatihan, meliputi layanan pelatihan catur, menggambar, mewarnai, kerajinan tangan, *English Club*, dan musik tradisional;
- Aplikasi *Bookless e-Library System*, dan i-Sabilulungan;
- Layanan Wali BEDAS (Wisata Literasi Bedas);
- Layanan PESAN BEDAS (Perpustakaan Sahabat Anak Bedas);
- Layanan JELITA (Jelajah Literasi);
- Layanan BERLIAN (Bedas Literasi Ramadhan);
- Layanan LENTERA LANGIT (Literasi Ceria Lambang Generasi Tangguh);
- Layanan Pembinaan Perpusdes, Perpustalah, Perpusus, Perpumas, dll;
- Layanan Pembinaan Pengelola Perpustalah, Perpusus, Perpumas, dll.

2.2.2 Urusan Kearsipan

a. Depo Arsip Kabupaten Bandung, yang berada di kompleks Pemerintah Kabupaten

Bandung, memiliki beberapa fasilitas, antara lain :

- Ruang *Audio Visual*
- Ruang Pameran
- 3 (tiga) Ruangan Arsip
- Ruang Arsip Tekstual; dan
- *E – Arsip*

b. Adapun bentuk layanan yang diselenggarakan pada bidang kearsipan, diantaranya

adalah :

- Pembinaan dan pendampingan penataan arsip di Perangkat Daerah, Desa, BUMD, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan lembaga Lainnya;
- Aplikasi “Silancar BEDAS” (Sistem Informasi Layanan Cepat Arsip) merupakan pengentryan berkas arsip ke dalam aplikasi;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung memiliki website resmi yaitu www.DISPUSIP.bandungkab.go.id yang mulai tayang pada tahun 2018, sebagai media penyampaian informasi kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.

2.3 Isu – isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, DISPUSIP Kabupaten Bandung tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM, sarana dan prasarana. Adapun isu-isu penting dan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh DISPUSIP pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Isu Strategis Daerah

a. Urusan Kearsipan

Isu-Isu Strategis pada urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- Jabatan fungsional arsiparis dan JFU Pengelola Kearsipan;
- Pengelola arsip di lembaga pencipta arsip yang belum memahami tentang pengelolaan arsip dinamis, arsip vital, arsip statis dan arsip digital;
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan yang berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Masalah yang dihadapi :

- Masih kurangnya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;
- Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis belum sesuai dengan aturan kearsipan;
- Masih kurangnya pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab./Kota;
- Kurang optimalnya penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan;
- Banyaknya arsip yang hilang atau rusak akibat bencana.

Strategi Pemecahan Masalah :

- Melaksanakan pemusnahan arsip/pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan;
- Melaksanakan pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah;
- Menyusun regulasi penyelenggaraan kearsipan;
- Pembuatan/pengembangan aplikasi;
- Melaksanakan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana.

b. Urusan Perpustakaan

Isu-Isu Startegis pada Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

- Daya beli masyarakat terhadap buku
- Jumlah koleksi bahan Pustaka
- Daya jangkau masyarakat ke perpustakaan daerah
- SDM teknis perpustakaan dan pengolah bahan perpustakaan secara Digital
- Kesadaran Masyarakat untuk melaporkan keberadaan naskah kuno
- Promosi Perpustakaan
- Sarana dan prasarana perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus di kabupaten bandung (Koleksi bahan bacaan maupun fasilitas gedung perpustakaan yang sesuai standar)
- Akses masyaraakat ke perpustakaan, terutama dikawasan perdesaan
- Jumlah pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan
- Minat pada baca buku dan budaya membaca di masyarakat Masalah yang dihadapi
- Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
- Kurangnya sosialisasi keberadaan Perpustakaan Daerah;
- Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung.

Strategi Pemecahan Masalah :

- Dilaksanakannya perhitungan Indeks Baca Masyarakat Kabupaten Bandung;
- Diselenggarakannya lomba-lomba seperti : Lomba menulis, mewarnai, menggambar, mereviu buku, presentasi buku;
- Dilaksanakan kegiatan-kegiatan Literasi, seperti : Lomba Bercerita, Lomba Perpustakaan, Kegiatan Festival Literasi, Roadshow Perpustakaan, Pembinaan kepada perpustakaan-perpustakaan, Pembinaan kepada Pengelola Perpustakaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD DISPUSIP Kabupaten Bandung dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara rinci rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan RKPD yang disajikan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Dinas Perpustakaan dan
Arsip

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
			5.			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih				
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				12.846.675.038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			12.846.675.038	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 73.90 - 97.15	12.846.675.038	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 73.90 - 97.15	12.846.675.038
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 persen	125.316.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 persen	125.316.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	95.316.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	95.316.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	5.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		2.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		2.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	10.777.378.671	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	10.777.378.671
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	10.769.319.671	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	10.769.319.671
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan	Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Dokumen	4.059.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Dokumen	4.059.000

						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandung	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandung	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	4.000.000
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku	100 persen	4.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku	100 persen	4.000.000
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	4.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	4.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku	100 persen	130.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku	100 persen	130.200.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	31.700.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	31.700.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Pegawai	95.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Pegawai	95.500.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP	100 persen	391.259.898	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP	100 persen	391.259.898
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.150.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.150.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	147.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	147.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4.077.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4.077.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.346.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.346.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.168.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.168.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	18.059.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	18.059.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	17.127.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	17.127.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	141.332.898	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	141.332.898
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	4.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	4.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP	100 Persen	29.300.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP	100 Persen	29.300.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	29.300.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	29.300.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,07		Pengadaan Mebelair	Kab. Bandung	Jumlah Unit Mebelair	-	-	Pengadaan Mebelair	Kab. Bandung	Jumlah Unit Mebelair	-	-
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	1.085.256.469	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	1.085.256.469
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.	Jumlah Laporan Penyediaan	2 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	2.000.000

							Bandung	Jasa Surat Menyurat				Bandung	Surat Menyurat				
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	143.013.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	143.013.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	940.243.469	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	940.243.469		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	303.964.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	303.964.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	20.000.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	147.389.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	147.389.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	20.000.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.575.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.575.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	100.000.000		
						Jumlah 1				12.846.675.038	Jumlah 1				12.846.675.038		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				872.640.500	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.796.358.500		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	0	0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kab. Bandung	- Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan	45,70	777.640.500	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kab. Bandung	- Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan	45,70	1.701.358.500		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2,01	0	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan	100%	540.500.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan	100%	1.455.218.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2,01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Bandung	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 layanan	0	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Bandung	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 layanan	0		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2,01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 perpustakaan	272.500.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 perpustakaan	1.187.218.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2,01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Bandung	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	40.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Bandung	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	40.000.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2,01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	44.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	44.000.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2,01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bandung	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	800 Eksemplar	0	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bandung	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	400 Eksemplar	0		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2,01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bandung	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.500	130.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bandung	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	130.000.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2,01	10	Penyusunan Data dan Informasi	Kab.	Jumlah Data dan Informasi	1	54.000.000	Penyusunan Data dan Informasi	Kab.	Jumlah Data dan Informasi	1	54.000.000		

						Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Bandung	Dialihmediakan		38.413.000	Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Bandung	Dialihmediakan		38.413.000	
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2,04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bandung	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	38.413.000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bandung	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	38.413.000	
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	4	0	0	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kab. Bandung	PERSENTASE INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAATKAN	100%	37.238.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kab. Bandung	PERSENTASE INFORMASI ARSIP YANG TERMANFAATKAN	100%	37.238.000	
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	4	2,01	0	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan	1 Dokumen	37.238.000	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan	1 Dokumen	37.238.000	
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	4	2,01	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kab. Bandung	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	6500 Arsip	37.238.000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kab. Bandung	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	6500 Arsip	37.238.000	
						Jumlah 2				1.183.003.800	Jumlah 2				2.158.398.600	
						Jumlah Total (1+2)				14.029.678.838	Jumlah Total (1+2)				15.005.073.638	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja DISPUSIP didiskusikan dalam pembahasan forum PD Kabupaten Bandung. Pada forum PD, ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DISPUSIP selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat dan Lembaga Daerah Kabupaten Bandung. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan, diantaranya melibatkan Bidang pengelolaan Perpustakaan Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno dan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung adalah proses untuk mengkaji, memverifikasi, dan menilai usulan kegiatan dari masyarakat (lewat Musrenbang) dan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, agar sesuai dengan:

- Kebutuhan layanan perpustakaan dan kearsipan,
- Prioritas pembangunan daerah,
- Kebijakan strategis Dinas,
- Kemampuan anggaran.

Keterkaitan dengan Musrenbang

Musrenbang

- Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten.
- Masyarakat bisa mengusulkan program, misalnya:
 - Pengadaan koleksi sarana dan prasarana perpustakaan.
 - Pengadaan buku ilmu pengetahuan praktis
 - Pengadaan paket sarana kearsipan.

Keterkaitan dengan Pokir DPRD

Pokir DPRD

- Pokir adalah usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat reses atau pertemuan langsung, misalnya:
 - Pengadaan koleksi sarana dan prasarana perpustakaan.
 - Pengadaan buku ilmu pengetahuan praktis
 - Pengadaan paket sarana kearsipan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN KEGIATAN DISPUSIP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam Renstra Perpustakaan RI disebutkan bahwa sasaran jangka menengah Tahun 2022-2024 adalah :

- a. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca.

Sejalan dengan sasaran jangka menengah Perpustakaan RI di atas, Dispusip Kabupaten Bandung melaksanakan kajian Indeks Baca masyarakat. Kajian ini penting dilaksanakan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan budaya membaca masyarakat di Kabupaten Bandung yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca yang optimal sesuai dengan sasaran jangka menengah Perpustakaan RI. Urusan Perpustakaan juga merupakan salah satu arah kebijakan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter.

Prioritas Nasional yang berkaitan dengan Urusan Kearsipan yaitu :

- a. Prioritas Nasional 4 : Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, dapat dilakukan dengan cara Peningkatan akses dan kualitas pelayanan arsip;
- b. PN7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan cara Peningkatan kualitas manajemen kearsipan;
- c. Pengarusutamaan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan cara Penerapan e-Arsip terintegrasi (SIKD).

Persentase lembaga yang tertib arsip dan termanfaatkan mencapai realisasi 100% di tahun 2021 dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terwujud salah satunya karena Dispusip mampu mengusulkan setiap PD agar mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana kearsipan, Dispusip juga selalu konsisten mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kearsipan ke setiap PD yang dibina. Sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip tentunya tidak terlepas dari visi dan misi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026. Adapun uraian visi dan misi Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

a. Visi dan Misi Bupati Bandung

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang **B**angkit, **E**dukatif, **D**inamis, **A**gamis, dan **S**ejahtera ”

Misi :

1. Misi Pertama : Membangkitkan Daya Saing Daerah;
2. Misi Kedua : Menyediakan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata;
3. Misi Ketiga : Mengoptimalkan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Kreatifitas dalam Bingkai Kearifan Lokal;
- 4 Misi Keempat : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Masyarakat yang berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan ; dan
- 5 Misi Kelima : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip Keadilan dan Keberpihakan pada Kelompok Masyarakat Lemah.

Sumber: www.bandungkab.go.id

b. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Visi :

“Perpustakaan Mencerdaskan Masyarakat, Kearsipan Pilar Akuntabilitas Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Misi :

1. Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola kearsipan sebagai bahan bukti autentik dan sumber informasi publik;
3. Mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip untuk kepentingan IPTEK;
4. Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK; dan
5. Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan kearsipan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rancangan Renja DISPUSIP 2025. Tujuan, sasaran beserta indikator nya dituangkan pada Tabel 3.2 berikut :

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET (Definisi Operasional)
Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan bagi Masyarakat serta Optimalnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Daerah				- Nilai IPLM - Nilai Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan		- UPLM 1 + UPLM 2 + UPLM 3 + UPLM 4 + UPLM 5 + UPLM 6 + UPLM 7 - (60 % x LAKE) + (40% x LAKI)
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik			Nilai RB General		Nilai diambil dari aplikasi SURABI Prov Jabar, berdasarkan evidence yang diinput oleh PD
		Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai diambil dari aplikasi SURABI Prov Jabar, berdasarkan evidence yang diinput oleh PD
			Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET (Definisi Operasional)
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terlaksananya	Persentase	Administrasi	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET (Definisi Operasional)
			Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET (Definisi Operasional)
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Merupakan Hasil dari Penilaian Perpusnas RI
Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat				IPLM	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Merupakan Hasil dari Penilaian Perpusnas RI
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET (Definisi Operasional)
				Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang ditemukan, dibagi jumlah Penelusuran Naskah Kuno, dikali 100 persen
					Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
	Meningkatnya tata kelola arsip yang tertib dan bermanfaat			Persentase PD yang mengelola secara Baku		
	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis			Tingkat Ketersediaan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) x 60% + Nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) x 40%
				Tingkat Ketersediaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	(Persentase Arsip Aktif yang Telah dibuatkan Daftar Arsip + Persentase Arsip Inaktif yang Telah dibuatkan Daftar Arsip + Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik + Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN) : 4
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET (Definisi Operasional)
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
					Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK		Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
					Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah masyarakat yang mengakses arsip dibagi jumlah masyarakat yang terlayani dikali 100
					Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2025 yang mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026, dan Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan

KODE REKENING			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	3	Penyediaan Peralatan RumahTangga
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu

2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	5	Pemeliharaan Mebel
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	0	0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	10	Penyusunan Data dan Informasin Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	0	0	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2	0	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk

						Dilestarikan dan Didayagunakan
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	3	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2	0	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	4	0	0	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	4	2	0	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	4	2	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

3.4 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bandung

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung adalah upaya mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh kebijakan, program, dan layanan, agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses, memanfaatkan, dan berkontribusi pada layanan perpustakaan serta kearsipan daerah.

Kebijakan internal

- Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung berkomitmen menjadikan layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip inklusif, ramah gender, dan aksesibel untuk semua kalangan.
- Penguatan kapasitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendukung layanan prima.

Integrasi dalam program dan kegiatan

Urusan Perpustakaan

Menyediakan koleksi bacaan yang mendukung kesetaraan gender (misalnya buku tentang pemberdayaan perempuan, literasi keluarga, parenting, kesehatan reproduksi).

- Memberi prioritas layanan kepada kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, lansia).
- Mengadakan pelatihan literasi digital yang bisa diikuti secara setara oleh perempuan, misalnya pelatihan UMKM perempuan, literasi keuangan keluarga.

Urusan Arsip

- Pengelolaan arsip yang mendukung hak informasi masyarakat tanpa diskriminasi gender.
- Memberi ruang bagi perempuan untuk berperan dalam kegiatan digitalisasi arsip sejarah desa atau arsip keluarga.

3.4.1 Manfaat Penyelenggaraan PUG (Pengarutamaan Gender)

Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Adapun manfaat dari penyelenggaraan PUG bagi pembangunan nasional, adalah memastikan bahwa perempuan dan laki-laki :

- Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan;
- Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
- Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan;
- Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan.

3.4.2 Mekanisme PUG (Pengarutamaan Gender)

Dalam perencanaan yang responsif gender, terdapat 3 mekanisme utama dalam PUG, yaitu:

- Melakukan analisis kebijakan gender :

Pada umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih netral gender (*gender neutral*) dan kadang-kadang, secara tidak sengaja, mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Dengan menggunakan **Data Pembuka Wawasan** kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada saat ini memberikan dampak berbeda kepada laki-laki dan perempuan

- Memformulasi kebijakan yang responsif gender :

Untuk menyusun Sasaran Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang menggiring kepada upaya mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

- Pengintegrasian gender dalam seluruh tahapan :

Seluruh kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap Formulasi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender di atas. Rencana aksi kebijakan ini perlu disertai dengan indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengimplemtasikan rencana aksi.

3.4.3 Kelembagaan PUG (Pengarutamaan Gender)

Dalam rangka percepatan PUG, maka setiap SKPD pemberdayaan perempuan perlu membentuk kelembagaan PUG yakni berupa kelompok kerja pengarusutamaan gender yang keanggotaannya dari unsur pimpinan unit kerja SKPD provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu disetiap unit kerja SKPD perlu dibentuk Focal Point Gender guna membantu tugas pokok dan fungsi Pokja PUG guna menyusun kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsive gender. Dalam proses pembentukan Pokja PUG dan FPG perlu konsultasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana, Provinsi, Bagian Organisasi, Talaksana kabupaten/kota.

Adapun mengenai kelembagaan PUG diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 Tahun 2011. Dalam Permendagri dijelaskan terdapat 4 lembaga / unit baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota, diantaranya adalah :

- POKJA Provinsi dan Kabupaten Kota (Pasal 9 dan 14);
- Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 11 dan 16);
- RANDA PUG di Provinsi dan Kabupeten/Kota (Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2));
- Focal Point Gender PUG di setiap SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 17 ayat (1), dan (2).

3.4.4 Hambatan Pelaksanaan PUG (Pengarutamaan Gender)

Penerapan pelaksanaan PUG memiliki beberapa tujuan penting yaitu untuk dapat meningkatkan peranan perempuan dalam kehidupan bangsa, serta dapat menjadi masukan bagi semua pihak pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi di luar itu semua, tentu saja pelaksanaan PUG ini memiliki kendala atau hambatan yang sering terjadi, antara lain :

- Budaya patriarki, secara tidak disadari tindakan-tindakan yang lahir masih bias gender. Pengkotak-kotakan peran berdasarkan relasi sosial bahwa perempuan “pekerja domestik”;
- Perbedaan paradigma. Belum tuntas nya pemahaman PUG intra eksekutif, maupun legislatif;
- Minimnya ketersediaan data terpilah;
- Lemahnya sosialisasi. Belum banyak menjangkau tingkat kecamatan/desa;
- Kebijakan anggaran masih netral (buta) gender;
- PUG dianggap sebagai pengaruh dari budaya barat;
- Hambatan kelembagaan SDM terbatas, pada institusi yang marginal, lemahnya aliansi sektor perempuan dan advokasi PUG di pemerintahan;
- Kurangnya komitmen pimpinan;
- Adanya stereotype bahwa PUG identik dengan perempuan.

Berdasarkan penjabaran mengenai PUG di atas, beberapa hal yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender yang direalisasikan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah sebagai berikut :

- Toilet Representatif : Toilet perempuan lebih banyak dibandingkan dengan toilet laki-laki;
- Adanya Ruang Laktasi : Lebih memudahkan Ibu Menyusui untuk mengASIhi buah hatinya;
- Ruang layanan yang ramah difabel, sehingga mudah dijangkau oleh para kaum Difabel
- Menyediakan Buku dengan tulisan Braille;
- Mengadakan lomba dan kegiatan lainnya khusus untuk kaum difable, untuk menciptakan kaum difable yang cakap dalam berliterasi maupun bersosialisasi;
- Penyusunan SOP layanan perpustakaan yang Responsif gender;
- Merencanakan sosialisasi untuk usulan program kegiatan yang mengintegrasikan isu gender;
- Selalu tersedianya tenaga pengelola perpustakaan baik laki-laki maupun perempuan;
- Melakukan pembinaan lebih lanjut mengenai pengelolaan perpustakaan khususnya untuk kaum laki-laki.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPUSIP

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 serta prakiraan maju Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada, Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pahu Indikatif	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai IKM		- 73.80	- 95.25	12.185.824.182,00			- 73.90 97.15	- 12.846.675.038,00
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku			100 persen	93.899.590,00			100 persen	125.316.000,00
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung		2 Dokumen	74.533.982	APBD		2 Dokumen	95.316.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung		2 Dokumen	7.435.599	APBD		2 Dokumen	8.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung		2 Dokumen	5.212.425	APBD		2 Dokumen	8.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung		2 Dokumen	1.992.284	APBD		2 Dokumen	5.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung		4 Dokumen	2.726.100	APBD		4 Dokumen	5.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung			999.600	APBD			2.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung			999.600	APBD			2.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu			100 persen	9.560.894.705,00			100 persen	10.777.378.671,00
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung		45 Orang/Bulan	9.556.722.605	APBD		45 Orang/Bulan	10.769.319.671
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung		1 Dokumen	2.106.900	APBD		1 Dokumen	4.059.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Kab.		2 Dokumen	2.065.200	APBD		2 Dokumen	4.000.000

						Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandung							
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku		100 persen	1.999.800,00			100 persen	4.000.000,00	
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	7 Laporan	1.999.800	APBD		7 Laporan	4.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku		100 persen	79.353.991,00			100 persen	130.200.000,00	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	2 Paket	18.847.700	APBD		2 Paket	31.700.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	2 Dokumen	1.500.000	APBD		2 Dokumen	3.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bandung	12 Pegawai	59.006.291	APBD		12 Pegawai	95.500.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP		100 persen	297.655.802,00			100 persen	391.259.898,00	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	7.150.000	APBD		1 Paket	7.150.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	127.736.750	APBD		1 Paket	147.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	20 Paket	3.972.400	APBD		20 Paket	4.077.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	3.118.800	APBD		1 Paket	5.346.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Paket	27.854.800	APBD		2 Paket	47.168.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	3 Dokumen	18.055.500	APBD		3 Dokumen	18.059.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	3 Laporan	8.560.000	APBD		3 Laporan	17.127.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	40 Laporan	99.207.752	APBD		40 Laporan	141.332.898	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	3 Dokumen	1.999.800	APBD		3 Dokumen	4.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP		100 Persen	29.104.650,00			100 persen	29.300.000,00	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung	-	-	APBD		-	-	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	0	-	APBD		0	-	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	5 Unit	29.104.650	APBD		5 Unit	29.300.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1		Pengadaan Meubelair	Jumlah Unit Meubelair	Kab. Bandung	1 Unit	-	APBD		-	-	
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	1	2,1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase ketersediaan operasional			1.719.036.644,00					

2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Bandung	2000 Eksemplar	147.733.058	APBD	2000 Eksemplar	130.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Dokumen	39.347.662	APBD	1 Dokumen	54.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung		100%	5.981.833.513,00	APBD	100%	246.140.500,00
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Bandung	5 Lokus	19.613.237	APBD	5 Lokus	39.141.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Bandung	15 Orang	99.198.013	APBD	15 Orang	133.999.500
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Bandung	1 Perpustakaan	5.863.022.263	APBD	1 Perpustakaan	73.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	3	0	Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Kab. Bandung	53.90	0	APBD	53.90	0
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	2	3	1	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Kab. Bandung	53.90	0	APBD	53.90	0
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	0	0	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO		20%	90.677.259,00		20%	95.000.000,00
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2	0	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase naskah kuno yang dikelola dengan baik		100%	90.677.259,00		100%	95.000.000,00
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Bandung	8 Orang	69.846.095	APBD	8 Orang	55.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	3	2	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Bandung	1 Eksemplar	20.831.164	APBD	1 Eksemplar	40.000.000
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Lembaga pencipta Arsip yang berkategori baik		20%	263.385.899,00		20%	286.389.100,00
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang sudah diaudit kearsipan internal		20%	70.163.877,00		20%	100.000.000,00
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Bandung	4.000 Berkas	49.966.600	APBD	4.000 Berkas	50.000.000
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Laporan	20.197.277	APBD	2 Laporan	50.000.000
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Terpelihara		100%	42.751.784,00		100%	84.712.300,00
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Bandung	100 Arsip	42.751.784	APBD	100 Arsip	84.712.300
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	2	2	0	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	Persentase pedoman penyelenggaraan kearsipan		100%	150.470.238,00		100%	101.676.800,00

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun kelima, pada periode Renstra 2021 – 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dispusip dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan PD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Renja Dispusip Kabupaten Bandung tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dispusip Kabupaten Bandung serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Demikian Perubahan Renja Dispusip Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana program dan kegiatan Dispusip Tahun 2025 disusun. Saran dan kritik membangun sangat diperlukan bagi penyusunan dokumen Rancangan Renja berikutnya ke arah yang lebih baik.

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

ttd.

TEGUH PURWAYADI

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA